

## Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya

Dhilla Indriaty<sup>1</sup>, Dinda Astriani<sup>2</sup>, Eli Sabrifha<sup>3</sup>, Lutfia Aqilla<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: [ddhillainddriaty@gmail.com](mailto:ddhillainddriaty@gmail.com)<sup>1</sup>, [ddindaa2021@gmail.com](mailto:ddindaa2021@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[eli.sabrifha@uin-suska.ac.id](mailto:eli.sabrifha@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>, [lutfiaaqilla2@gmail.com](mailto:lutfiaaqilla2@gmail.com)<sup>4</sup>

Corresponding Author: Dhila Indriaty

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta akar ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan nasional, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasinya, serta merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur yang relevan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, dan Kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan karena lemahnya implementasi dan kurangnya pelibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan pendidikan yang berbasis konteks sosial-budaya, pelatihan guru yang adaptif, serta integrasi kurikulum yang menghargai keragaman lokal sebagai langkah menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan transformatif.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Ketimpangan, Sosial, Budaya

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the forms and root causes of social cultural inequities in national education evaluate existing policies designed to address them and formulate context sensitive inclusive and socially just educational strategies. Employing a qualitative library research approach the study synthesizes recent journal articles policy documents and research reports. Findings reveal that flagship policies such as the Indonesia Smart Program PIP school admission zoning and the Merdeka Curriculum have not eradicated inequity due to implementation gaps and limited community engagement. The study recommends policy shifts toward socially and culturally grounded approaches adaptive teacher training and curriculum integration that values local wisdom as essential steps toward a more equitable and transformative education system.*

*Keywords:* Policy, Education, Disparity, Social, Culture

### PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan bangsa karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, pemberdayaan sosial, serta penguatan kohesi budaya. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keberagaman geografis, sosial, dan budaya, sistem pendidikan semestinya dirancang untuk menjamin kesetaraan akses

dan kualitas bagi seluruh peserta didik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan budaya masih menjadi tantangan besar yang menghambat tercapainya keadilan pendidikan.

Ketimpangan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak antara wilayah perkotaan dan pedesaan, hingga keterbatasan kurikulum nasional dalam mengakomodasi kekayaan budaya lokal. Siswa di daerah tertinggal sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, dan teknologi, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran. Di sisi lain, peserta didik dari latar belakang ekonomi rendah juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan akibat beban finansial yang tidak tertutupi oleh bantuan sosial secara efektif. Selain itu, keseragaman kurikulum nasional menyebabkan banyak komunitas budaya merasa tidak terwakili dalam materi pembelajaran, sehingga berpotensi melemahkan identitas lokal dan memperdalam marginalisasi budaya.

Berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga penerapan Kurikulum Merdeka. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan belum berhasil ditekan secara signifikan, bahkan dalam beberapa kasus justru menciptakan ketimpangan baru yang bersifat struktural.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung secara historis dan struktural. Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keterpenciran geografis, dan marginalisasi budaya memainkan peran signifikan dalam membatasi akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok tertentu di masyarakat. Fukaro (2025) menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang timpang, di mana individu dari kelas bawah sering kali terjebak dalam siklus ketidakadilan pendidikan karena rendahnya kemampuan ekonomi dan lemahnya dukungan institusional.

Sementara itu, pendekatan multikultural dalam pendidikan semakin diakui sebagai jawaban atas tantangan keberagaman di Indonesia. Anwar (2024) menyatakan bahwa sistem pendidikan yang seragam dan tidak kontekstual telah mengabaikan keragaman budaya lokal, yang pada akhirnya berdampak pada keterasingan peserta didik dalam proses belajar. Ketika kurikulum dan kebijakan pendidikan tidak mencerminkan identitas sosial-budaya peserta didik, maka pendidikan justru berisiko menjadi alat asimilasi paksa daripada ruang pemberdayaan.

Asrulla, Sari, dan Mahardika (2025) juga mengkritisi bahwa implementasi kebijakan pendidikan nasional selama ini, meskipun berorientasi pada pemerataan, sering kali tidak efektif karena tidak mempertimbangkan secara serius realitas sosial dan budaya lokal. Program-program seperti zonasi atau bantuan pendidikan memang penting, namun distribusinya kerap tidak tepat sasaran dan tidak menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sejalan dengan temuan Calista dan Kondo (2025), yang menyatakan bahwa tanpa peran aktif

masyarakat dan strategi berbasis data sosial yang kuat, pemerataan pendidikan hanya akan menjadi wacana normatif.

Lebih lanjut, Mujiburrohman dan Putri (2025) menyoroti bahwa ketimpangan dalam alokasi anggaran dan distribusi sarana pendidikan menjadi akar struktural dari rendahnya kualitas pendidikan di wilayah tertinggal. Oleh karena itu, mereka mendorong kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga memberdayakan sekolah dan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Dalam konteks tersebut, pendidikan tidak cukup hanya dilihat sebagai urusan administratif atau teknokratis, melainkan harus dipandang sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu merespons dinamika dan kompleksitas masyarakat. Diperlukan kebijakan pendidikan yang inklusif, berbasis bukti, dan kontekstual terhadap keberagaman lokal agar sistem pendidikan benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta akar ketimpangan sosial dan budaya dalam sistem pendidikan nasional, mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diterapkan dalam mengatasi ketimpangan tersebut, serta merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen kebijakan pendidikan nasional, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu ketimpangan pendidikan, keadilan sosial, dan kebijakan inklusif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber yang kredibel menggunakan kata kunci seperti "ketimpangan pendidikan", "kebijakan pendidikan", "pendidikan inklusif", dan "kesenjangan sosial budaya", dengan rentang tahun publikasi 2018 hingga 2024. Literatur yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola kebijakan, serta hubungan antarvariabel yang relevan dalam konteks pendidikan dan ketimpangan sosial-budaya.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menyusun sintesis konseptual dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan bukti literatur yang kuat, guna menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Realitas Ketimpangan Sosial dan Budaya dalam Pendidikan Nasional

Kondisi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan akses dan kualitas. Perbedaan kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan budaya antarwilayah telah memunculkan jurang ketimpangan pendidikan yang cukup dalam. Sebagian besar siswa dari daerah-daerah terpencil, komunitas adat, serta keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah cenderung mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara. Ketimpangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan sarana fisik seperti bangunan sekolah atau ketersediaan tenaga pengajar, tetapi juga menyangkut isi pembelajaran yang cenderung tidak mencerminkan realitas sosial dan budaya peserta didik. Anak-anak dari komunitas marginal sering kali merasa tidak terwakili dalam materi pembelajaran karena konten pendidikan yang digunakan mengabaikan konteks lokal mereka. Hal ini menimbulkan rasa keterasingan dalam proses belajar yang seharusnya bersifat memberdayakan.

Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memiliki posisi strategis sebagai pilar utama yang membentuk masyarakat yang cerdas, adil, dan beradab. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan yang cukup kompleks, baik dari sisi sosial maupun budaya. Ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan terlihat dari perbedaan akses dan kualitas layanan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, atau perbatasan sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik profesional, serta kurangnya fasilitas pendukung menjadi penghalang utama bagi mereka untuk menikmati hak pendidikan secara optimal.

Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah juga mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan hidup lainnya menjadi beban tambahan yang memperparah ketimpangan ini. Maka tak heran, pendidikan kerap kali hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki modal sosial dan ekonomi lebih tinggi, sementara kelompok rentan justru semakin tertinggal. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial. Ketimpangan budaya dalam pendidikan juga menjadi isu yang tak kalah penting. Globalisasi yang bergerak cepat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara pandang terhadap budaya lokal. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya, justru belum mampu mengakomodasi keberagaman secara utuh. Kurikulum nasional cenderung seragam dan tidak mempertimbangkan kekayaan lokal yang dimiliki setiap daerah. Akibatnya, banyak peserta didik merasa asing dengan isi pembelajaran yang tidak mencerminkan kehidupan sosial budaya mereka. Mereka tidak hanya kesulitan memahami materi, tetapi juga kehilangan koneksi emosional dengan lingkungan belajar.

Dalam situasi tersebut, pendidikan sering kali gagal membangun identitas budaya peserta didik. Alih-alih menjadi ruang untuk merayakan keberagaman, sekolah justru bisa menjadi tempat di mana budaya lokal tersingkir. Untuk itu,

diperlukan pembaruan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal. Pendidikan harus bisa merangkul pluralitas yang ada di masyarakat, agar tidak menciptakan dominasi budaya tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik identitas. Di tengah tantangan tersebut, pendidikan tetap diyakini sebagai agen perubahan sosial yang kuat. Ia memiliki peran besar dalam membentuk karakter peserta didik, membangun kesadaran kritis, serta menumbuhkan nilai-nilai sosial yang mendorong toleransi dan kebersamaan. Namun, agar mampu menjalankan peran strategis itu, sistem pendidikan nasional harus mengalami transformasi mendasar. Pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial dan teknologi, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika budaya masyarakat. Tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi juga harus menjamin bahwa konten dan metode pembelajaran benar-benar relevan, kontekstual, dan memberdayakan. Dari sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk merancang kebijakan pendidikan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga humanistik dan berbasis keadilan sosial.

Realitas ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan nasional di Indonesia masih menunjukkan persoalan yang kompleks dan berlapis. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kesenjangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan bukan semata disebabkan oleh kelemahan administratif, melainkan mencerminkan ketidakmerataan yang bersifat struktural dan sistemik. Mujiburrohman dan Putri (2025) menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, meskipun secara nominal meningkat, belum mampu menjangkau secara adil wilayah-wilayah tertinggal. Ketimpangan distribusi fasilitas, rendahnya kapasitas guru, serta minimnya infrastruktur dasar di daerah terpencil menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat di wilayah perkotaan atau dengan status sosial-ekonomi menengah ke atas.

Ketimpangan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan konstruksi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Tatang Muttaqin (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa determinan ketimpangan pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor multilevel – yakni individu, keluarga, sekolah, dan komunitas. Interaksi antara rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, kemiskinan struktural, dan lemahnya tata kelola pendidikan daerah semakin memperdalam jurang ketimpangan. Di banyak wilayah, sekolah masih kesulitan memenuhi standar minimal layanan pendidikan karena terbatasnya peran negara dan lemahnya partisipasi masyarakat.

Lebih jauh, Nur Farida Liyana (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketika akses pendidikan bermutu hanya tersedia bagi kelompok tertentu, peluang mobilitas sosial pun terhambat, sehingga memperkuat pola stratifikasi sosial yang sudah ada. Dengan kata lain, pendidikan gagal menjalankan peran sebagai alat pemerataan dan justru memperkuat status quo sosial-ekonomi.

Dalam dimensi kebijakan, studi Bambang Irawan et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah mengadopsi prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam perumusan kebijakan pendidikan, implementasinya masih menghadapi hambatan sistemik. Regulasi yang belum adaptif terhadap keragaman

lokal, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pendekatan birokratis yang sentralistik menyebabkan kebijakan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar dan sistem zonasi belum mampu menghapus ketimpangan secara signifikan.

Di sisi lain, Pratiwi dan Fatma (2023) menyoroti bahwa era globalisasi justru memperlebar kesenjangan dalam pendidikan, khususnya melalui ketimpangan pemanfaatan teknologi dan akses terhadap informasi. Sekolah-sekolah di wilayah maju mampu mengintegrasikan inovasi digital dalam pembelajaran, sementara sekolah di wilayah marginal tertinggal jauh karena infrastruktur dasar seperti listrik dan internet pun belum memadai. Dalam konteks ini, pelibatan aktif masyarakat lokal, termasuk tokoh adat dan organisasi sipil, menjadi sangat penting untuk menjembatani gap sosial dan budaya yang melekat dalam dunia pendidikan.

Berbagai temuan literatur tersebut memperkuat fakta bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif atau teknis. Diperlukan transformasi kebijakan yang berbasis pada keadilan struktural, sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal, serta melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk memperkecil jurang ketimpangan, baik dari sisi sosial ekonomi maupun kultural. Ini dapat diwujudkan melalui kurikulum fleksibel yang mengakomodasi muatan lokal, pelatihan guru yang multikultural, penyediaan sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia benar-benar menjadi alat transformatif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan (Baiti, 2024).

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam merespons dan mengatasi ketimpangan sosial yang terus berkembang di masyarakat, terutama dalam konteks stratifikasi sosial yang memengaruhi akses terhadap berbagai sumber daya penting seperti ekonomi, pekerjaan, dan layanan publik. Dalam realitasnya, individu yang berasal dari latar belakang ekonomi dan sosial yang lemah kerap mengalami hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik karena keterbatasan fasilitas, biaya, maupun akses informasi. Kondisi ini tidak hanya memperkuat posisi kelompok yang telah mapan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga membatasi ruang gerak kelompok yang berada di lapisan bawah untuk melakukan mobilitas sosial secara adil. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa sekadar dipahami sebagai proses akademik semata, melainkan harus dilihat sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menciptakan keadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperluas peluang hidup yang lebih baik bagi semua lapisan, tanpa terkecuali. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas, sistem pendidikan nasional seharusnya mampu menjadi penggerak utama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan budaya yang selama ini melekat dalam struktur masyarakat Indonesia (Armansyah, 2024).

Kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat serius, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Realitas ini tampak jelas dari sulitnya akses menuju sekolah, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, hingga minimnya kualitas serta distribusi guru yang profesional. Tidak

hanya itu, tekanan ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga memperburuk situasi, sehingga pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara. Banyak sekolah di pedesaan masih beroperasi dalam keadaan tidak layak, dengan bangunan seadanya dan fasilitas yang minim, sementara guru yang bertugas di wilayah tersebut sering kali kekurangan pelatihan dan dukungan yang memadai. Bahkan, masih banyak orang tua yang memandang pendidikan sebatas formalitas dasar, bukan sebagai investasi masa depan, sehingga anak-anak cenderung lebih didorong untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih serius, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat untuk mengatasi ketimpangan yang berakar dalam struktur sosial dan budaya bangsa (Hujaimah, 2023).

### Evaluasi Kritis terhadap Respons Kebijakan Pendidikan yang Ada

Pemerintah selama ini telah merespons persoalan ketimpangan pendidikan melalui berbagai kebijakan. Beberapa program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak. Namun, ketika kebijakan ini diterapkan di lapangan, berbagai kendala muncul. Banyak anak yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdata dengan baik. Sistem zonasi kadang-kadang justru memperkuat ketimpangan karena sekolah unggulan hanya berada di pusat kota. Sementara Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk fleksibel pun belum menjangkau daerah-daerah yang kurang fasilitas dan tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat seragam sering kali tidak efektif untuk negara dengan tingkat keberagaman setinggi Indonesia.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan wujud kebijakan afirmatif pemerintah dalam menjawab kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah. Meskipun secara konseptual PIP memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai berbagai permasalahan yang membuat kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, lemahnya sosialisasi kepada orang tua siswa, hingga kendala teknis dalam proses verifikasi data. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak sampai tepat waktu, tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali oleh siswa yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan semacam ini masih berjarak dengan kondisi riil masyarakat penerima manfaat.

Dari sisi struktur pelaksanaan, program ini juga belum sepenuhnya didukung oleh sistem birokrasi yang kuat dan efisien. Peran dinas pendidikan daerah cenderung lemah dalam pengawasan dan pengelolaan data, sehingga beban administrasi sepenuhnya berada di tangan sekolah, khususnya operator dan kepala sekolah. Penyaluran dana PIP dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan di semua jenjang pendidikan. Misalnya, pencairan dana untuk siswa

SMK pada tahun 2020 hanya mencapai sekitar 45%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun (Jumanah, 2023). Penurunan ini turut memengaruhi peningkatan angka putus sekolah secara nasional. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya pemerataan pendidikan melalui PIP belum mampu menekan kesenjangan yang terjadi, justru memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan pendidikan secara nasional.

Evaluasi terhadap respons kebijakan pendidikan di Indonesia memperlihatkan adanya kemajuan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan substantif. Asnawi et al. (2021) dalam tinjauan evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) menemukan bahwa meskipun PIP berhasil meningkatkan partisipasi siswa di jenjang SMP dan SMA, program ini kurang efektif pada jenjang dasar (SD). Salah satu kendala utama adalah mekanisme verifikasi yang kompleks dan jumlah bantuan yang tergolong rendah, sehingga tidak mampu menurunkan angka putus sekolah di SD secara signifikan.

Lebih jauh, Situmorang & Damanik (2025) mengungkap bahwa efektivitas monitoring dan evaluasi (M&E) dalam implementasi kebijakan pendidikan masih seputar pengumpulan data dan pelaporan formal, tetapi kurang memadai dalam mengukur dampak nyata terhadap mutu pembelajaran dan kesetaraan akses. Mereka menyarankan perbaikan prosedur M&E yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian Yanti et al. (2024) menyoroti evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka dan kebijakan afirmatif lain. Ditemukan bahwa kebijakan tersebut mampu memperluas akses bagi siswa prasejahtera, namun di sisi lain organisasi pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan dukungan profesional bagi guru masih lemah. Akibatnya, potensi peningkatan kualitas belum maksimal tanpa adanya penguatan infrastruktur dan pelatihan guru yang memadai.

Dalam ranah inklusi, studi Nowak et al. (2024) terhadap kebijakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa adanya peningkatan integrasi sosial di sekolah. Namun, alokasi sumber daya dan kesiapan guru masih perlu diperkuat agar inklusi berjalan efektif dan merata.

Evaluasi kebijakan belajar digital di wilayah pedesaan oleh Lestari et al. (2024) juga menarik dicermati. Mereka menemukan bahwa walaupun kebijakan e-learning telah dijalankan, ketimpangan infrastruktur dasar (listrik, internet) serta literasi digital guru dan siswa menghambat hasil positif yang signifikan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun respons kebijakan pendidikan seperti PIP, Kurikulum Merdeka, inklusi, dan digitalisasi menunjukkan niat afirmatif, ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan (terutama regulasi M&E), distribusi sumber daya, kesiapan guru, serta akurasi sasaran dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara penuh. Evaluasi kritis terhadap respons kebijakan ini menegaskan perlunya mekanisme pemantauan berbasis bukti, penajaman prosedur distribusi, serta peningkatan kapasitas institusional dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap PIP menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi pendanaan, tetapi juga dari aspek manajemen, komunikasi, dan pemantauan. Pemerintah perlu memperkuat sistem

pendataan yang akurat, mempercepat alur pencairan bantuan, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya program ini. Dalam konteks pemerataan pendidikan, keberhasilan kebijakan seperti PIP bukan hanya diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi dari dampak nyatanya terhadap keberlangsungan pendidikan siswa miskin. Kebijakan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada level administratif, melainkan menjangkau kebutuhan konkret peserta didik agar tidak ada lagi yang terpinggirkan dari hak memperoleh pendidikan yang layak.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang direalisasikan melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada dasarnya dirancang sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi peserta didik agar tidak terhambat dalam melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, dalam implementasinya di berbagai daerah, ditemukan berbagai hambatan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan yang menjadi dasar pijakannya. Tidak sedikit penerima bantuan yang justru tidak memenuhi syarat, sementara siswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi masih bermasalah, sehingga mengganggu akurasi distribusi bantuan.

Di samping permasalahan ketepatan sasaran, pelaksanaan program juga menghadapi kendala dalam hal informasi dan pemahaman masyarakat. Minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar orang tua siswa tidak memahami fungsi dan manfaat dari KIP, bahkan ada yang tidak mengetahui prosedur pencairannya. Selain itu, birokrasi yang panjang dan kompleks seringkali memperlambat proses penyaluran bantuan. Ketika program yang semestinya bersifat solutif justru terhambat oleh teknis administratif, maka efektivitas kebijakan itu sendiri patut dipertanyakan. Hambatan-hambatan ini menjadi cermin bahwa respons kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai dari kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga dari seberapa baik kebijakan itu dapat dijalankan secara merata, transparan, dan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Distribusi penerima manfaat PIP masih didominasi oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara daerah-daerah di kawasan timur Indonesia justru menerima alokasi yang lebih rendah (Gutama, 2021). Padahal, jika ditinjau dari indikator kesejahteraan dan kebutuhan akses pendidikan, kawasan timur memiliki urgensi yang lebih tinggi. Ketimpangan distribusi ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan sudah menjangkau seluruh provinsi, pemerataan dan keadilan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap kebijakan seperti PIP menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menilai keberhasilan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan utama kebijakan yakni keadilan dan pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan respons strategis pemerintah terhadap persoalan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi siswa, menghapus stigma sekolah favorit, dan

memperkuat posisi sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Zonasi diharapkan dapat mengarahkan peserta didik untuk bersekolah di wilayah terdekat dari tempat tinggalnya, sehingga biaya pendidikan, terutama transportasi, menjadi lebih ringan dan distribusi peserta didik lebih merata. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem zonasi masih menemui berbagai kendala, baik secara teknis maupun struktural. Salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan sekolah negeri di seluruh wilayah, yang justru menyulitkan peserta didik di daerah tertentu untuk mengakses sekolah sesuai ketentuan zonasi. Akibatnya, anak-anak dari wilayah dengan fasilitas terbatas menjadi terhambat untuk mengenyam pendidikan sesuai haknya (Mashrul, 2024).

### **Strategi Kebijakan Pendidikan yang Responsif terhadap Konteks Sosial dan Budaya**

Pendidikan tidak bisa lagi dilihat sebagai sistem yang seragam dan sentralistik, melainkan harus menjadi ruang yang dinamis dan fleksibel untuk menjawab tantangan lokal. Daerah-daerah harus diberikan kewenangan lebih besar untuk menyesuaikan pendidikan dengan karakteristik masyarakatnya. Kurikulum perlu diisi dengan nilai-nilai lokal agar anak-anak merasa terhubung dengan apa yang mereka pelajari. Guru juga harus dilatih untuk memahami konteks sosial-budaya peserta didik, bukan hanya mengajar berdasarkan standar akademik nasional. Strategi kebijakan juga perlu dibangun atas dasar data yang konkret dari masing-masing wilayah, agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal, tokoh adat, serta organisasi sipil menjadi kunci dalam membangun kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya akan menjadi alat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tetapi juga menjadi jalan untuk menjembatani kesenjangan sosial dan menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan bersama.

Kebijakan pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas proses pembelajaran dan efektivitas strategi pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Kebijakan pendidikan yang disusun dan diterapkan secara tepat akan mampu menjadi katalisator dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kebijakan yang berbasis pada realitas sosial di berbagai daerah mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran, penguatan kurikulum yang relevan, serta peran aktif guru dan masyarakat dalam mendukung jalannya pendidikan. Dengan demikian, pendekatan kebijakan pendidikan yang kontekstual akan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mempersempit kesenjangan sosial dan budaya di dunia pendidikan (Hendrawati, 2024).

Selain menyoroti pentingnya inovasi dalam strategi pembelajaran, juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan komunitas lokal. Kolaborasi lintas level tersebut dianggap esensial

untuk menjadikan pendidikan sebagai ruang yang terbuka terhadap perbedaan, menghargai keberagaman budaya, serta menjawab kebutuhan kerja dan tantangan global. Kebijakan yang mendukung kurikulum yang fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, pendekatan multikultural, serta pemanfaatan teknologi secara merata akan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan tanggap terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, strategi kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh perumusan undang-undangnya, tetapi juga oleh kesesuaian antara kebijakan tersebut dengan kondisi sosial dan budaya yang dihadapi secara nyata di setiap wilayah di Indonesia.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi secara turun-temurun. Melalui pendidikan, individu diberi akses terhadap keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang lebih baik, sehingga memungkinkan mereka untuk memperbaiki kondisi hidupnya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan formal, tetapi juga harus mampu menyentuh akar-akar ketidaksetaraan sosial yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak memiliki akses pendidikan yang setara. Respons kebijakan yang tanggap terhadap kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap wilayah menjadi syarat mutlak agar pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai alat transformasi sosial.

Penerapan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kondisi masyarakat lokal perlu memperhatikan banyak aspek, termasuk karakteristik budaya, kondisi geografis, serta keberagaman nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, memerlukan strategi yang tidak bisa disamakan dengan pendekatan di wilayah perkotaan. Perluasan akses pendidikan anak usia dini, pelatihan guru dengan pendekatan multikultural, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan merupakan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif. Keterlibatan masyarakat lokal juga sangat penting dalam memastikan bahwa program pendidikan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan mereka (Sarjito, 2024).

Program-program seperti bantuan tunai pendidikan telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan dalam membantu anak-anak dari keluarga miskin agar tetap melanjutkan sekolah. Namun, efektivitas kebijakan semacam ini sangat tergantung pada bagaimana strategi pelaksanaannya diadaptasi dengan kondisi sosial dan budaya penerima manfaat. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya; oleh karena itu, strategi kebijakan yang dirancang perlu menyasar aspek keberagaman dan inklusi sebagai bagian inti dari sistem. Hanya dengan pendekatan yang responsif terhadap konteks nyata masyarakat, pendidikan dapat menjadi sarana keadilan sosial yang menjangkau semua kalangan, bukan hanya mereka yang sudah berada dalam posisi menguntungkan.

Implementasi strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi budaya di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dalam literatur akademik. Iin Wahyuni dan Muhibbin (2024) menemukan bahwa penerapan

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan literasi sosial siswa, keterlibatan aktif, dan kemampuan berpikir kritis, meskipun tantangan fasilitas dan waktu belajar tetap menjadi kendala. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pelatihan guru dan penyediaan media ajar berbasis budaya lokal sebagai strategi kebijakan pendidikan yang relevan.

Lebih jauh, Feronika (2023) menekankan bahwa kebijakan nasional harus mengintegrasikan aspek sosial dan budaya guna membangun sistem yang inklusif dan menghormati keberagaman. Meskipun Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 dan regulasi terkait sudah menyertakan prinsip *local wisdom*, kendala terletak pada disparitas implementasi yang masih tinggi antardaerah.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan efektivitas pendekatan pembelajaran kontekstual terhadap penguatan karakter dan pemahaman konsep. Studi di SD/MI menunjukkan peningkatan motivasi dan pemahaman konsep siswa setelah guru menerapkan pendekatan CTL berbasis situasi nyata (Audia dkk., 2024). Selain itu, Sunaryati et al. (2024) menyatakan bahwa pembelajaran Pancasila dengan pendekatan yang kontekstual berhasil memperkuat sikap sosial seperti empati dan toleransi.

Model pendidikan terpadu yang dikemukakan Putro et al. (2025)(2025), yaitu *Contextualized Inclusive & Integrative Education (CII)*, menawarkan kerangka kebijakan komprehensif. CII menggabungkan pembelajaran kontekstual, inklusi, dan integrasi kurikulum, menghasilkan peningkatan performa akademik dan adaptasi sosial siswa. Model ini direkomendasikan sebagai strategi kebijakan responsif yang mampu diterapkan lintas jenjang dan konteks sosial budaya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat nilai-nilai karakter, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi ajar. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal juga sangat ditentukan oleh kesiapan guru, ketersediaan media pembelajaran yang relevan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Model seperti *Contextualized Inclusive & Integrative Education (CII)* menawarkan kerangka strategis yang dapat diadaptasi di berbagai wilayah untuk menjembatani kesenjangan sosial dan budaya yang ada. Dengan demikian, kebijakan pendidikan masa depan perlu lebih mengedepankan pendekatan berbasis konteks, memperkuat kapasitas daerah, serta menjadikan keragaman budaya sebagai kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan yang humanis dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan akses dan fasilitas, tetapi juga menyentuh aspek kurikulum, kebijakan, serta representasi identitas budaya dalam proses pembelajaran. Realitas ini menunjukkan bahwa pendidikan belum

sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai instrumen pemerataan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat marginal seperti yang berada di daerah tertinggal, komunitas adat, dan keluarga miskin.

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, Kurikulum Merdeka, hingga program pendidikan inklusif, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut mengusung semangat pemerataan dan keadilan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut.

Temuan dalam kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma kebijakan pendidikan dari pendekatan yang seragam dan teknokratis menuju strategi yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada realitas sosial-budaya masyarakat lokal. Strategi kebijakan pendidikan yang efektif harus mencakup pelatihan guru berbasis budaya lokal, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kondisi daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun sistem pendidikan yang adil, memberdayakan, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan yang berbasis pada keadilan struktural dan keberagaman lokal adalah langkah penting menuju pendidikan nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2024). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 6(1), 35–48.
- Armansyah. (2024). Implementasi sistem pendidikan dalam mengatasi ketidaksetaraan; Pengaruh terhadap stratifikasi sosial. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 1–9.
- Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's education outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.30363>
- Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>
- Audia, W., Rahmawati, R., & Farhurohman, O. (2024). Efektivitas pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPS di SD/MI. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(4), 96–110. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.466>
- Baiti, J. N. (2024). Pendidikan dan lingkungan sosial. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1–14.
- Feronika, A., & Si'Min. (2023). Isu-isu kritis kebijakan pendidikan dan relasinya dengan pendidikan Islam: Kebijakan Merdeka Belajar dan dampaknya bagi

- pendidikan. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(1), Article 1. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jatp/article/view/2208>
- Fukaro, A. (2025). Pengaruh latar belakang sosial terhadap kesempatan pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1322>
- Gutama, A. S. (2021). Implementasi KIP. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1-8.
- Hendrawati, T. (2024). Kebijakan pendidikan dalam meningkatkan proses dan strategi pendidikan. *Technical and Vocational Education International Journal*, 1-5.
- Hujaimah, S. (2023). Faktor, penyebab, dan solusi kesenjangan sosial dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 1-7.
- Irawan, B., Simon, J. C., Alif, M. Z., Saliman, A. R., Fatmawati, E., & Judijanto, L. (2024). Addressing educational inequality through sustainable policies: An evaluation from the education policy and SDGs perspective in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3152. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3152>
- Jumanah. (2023). Evaluasi PIP. *PISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 1-15.
- Lestari, Y. E., Pudin, Y. A., & Wibowo, V. M. (2024). The impact of digital learning policies on educational equity in rural Indonesian schools. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62951/ijjeapa.v1i2.74>.
- Liyana, N. F. (2023). The effect of educational inequality on economic growth in Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 144-153. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2259>.
- Mashrul, N. N. (2024). Efektivitas prilaku organisasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1-8.
- Mujiburrohman, & Putri, D. (2025). The impact of social inequality on educational quality in Indonesia: Challenges and policy recommendations. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 3(1), Article 01. <https://doi.org/10.61455/sujiem.v3i01.248>.
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of unequal access to and quality of education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>.
- Nowak, K., Kowalski, P., & Zielinska, A. (2024). Evaluating the outcomes of inclusive education policies for students with disabilities in Indonesian schools. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62951/ijjeapa.v1i2.76>.
- Pratiwi, A., & Fatma, N. A. (2023). Social inequality facing education as an impact of the globalization era. *International Journal of Students Education*, 1(2), 519-523. <https://doi.org/10.62966/ijose.v1i2.518>.
- Putro, Y. L. C. A., Afriyanti, R., Sandi, F. A., & Parassa, H. S. (2025). CII education: An offering concept for Indonesian education (Study on SMK KITA and EF-ILC).

*Ilomata International Journal of Social Science*, 6(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.61194/ijss.v6i2.1652>.

Sarjito, A. (2024). Implikasi kebijakan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. *Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 1-24.

Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2025). Efektivitas monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan pendidikan: Pendekatan dan tantangan. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1486>.

Sunaryati, T., Kurnia, E. H., Puri, A. R., Pitriyani, N., & Sari, I. F. S. (2024). Strategi dan metode yang dapat diterapkan dalam pelajaran berbasis kontekstual dalam pembelajaran Pancasila. *Jurnal Eksplorasi Pendidikan*, 7(10). <https://ojs.co.id/1/index.php/jep/article/view/2079>.

Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138>.